

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaporan keuangan suatu perusahaan diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan memuat informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya, keputusan investasi oleh investor dan calon investor.

Salah satu motif mengapa investor menanamkan modalnya pada suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan profit di masa depan. Oleh karena itu, investor perlu mengetahui keadaan perusahaan, apakah perusahaan tersebut layak untuk dijadikan ladang investasi yang menguntungkan dan bagaimana keberlanjutannya.

Untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan, biasanya investor melakukan analisis *fundamental* dengan menggunakan informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan informasi yang transparan, tepat waktu dan akurat untuk kebutuhan investor maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

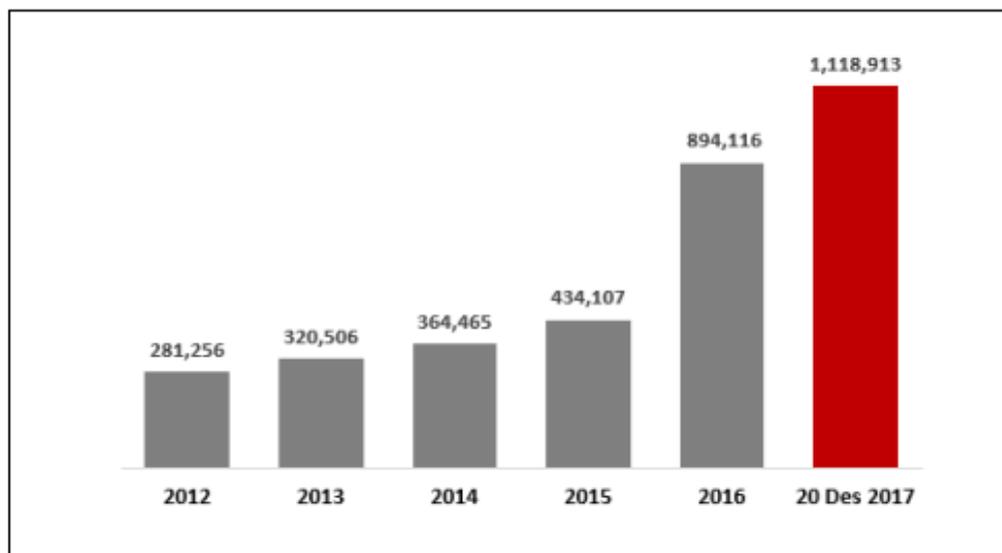
Pada Gambar 1.1 menunjukkan grafik pertumbuhan investor berdasarkan jumlah SID (*Single Investor Identification*) per 20 Desember 2017, yang menyatakan bahwa terdapat 1.118.913 investor atas saham, obligasi maupun

reksadana (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2017). Jumlah investor di pasar modal Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Grafik pertumbuhan investor pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2017 selalu terjadi peningkatan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat investasi pada pasar modal di Indonesia. Bertambahnya minat investasi di pasar modal tak hanya dialami oleh investor lokal saja, namun investor asingpun banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Baru-baru ini perusahaan penyedia jasa penerbangan milik negara, Garuda Indonesia menerbitkan *global bonds* untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sehingga, kebutuhan akan informasi terkait perusahaan juga akan semakin meningkat.

**Gambar 1.1**

**Grafik Pertumbuhan Total Jumlah SID (2012-20 Desember 2017)**



*Sumber : Website PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia*

Semakin bertambahnya kebutuhan informasi bagi investor dan *stakeholders* lainnya, membuat perusahaan perlu untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan. Pengungkapan informasi telah disebutkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) sebagai salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi perusahaan agar dapat menyajikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Investor menginginkan informasi yang luas dan relevan untuk mengambil keputusan dengan tepat yang berkaitan dengan investasi modalnya pada suatu perusahaan.

Terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu *mandatory disclosure* (pengungkapan informasi yang bersifat wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan informasi yang bersifat sukarela). *Mandatory disclosure* lebih kepada pengungkapan informasi yang harus dilakukan perusahaan karena dianggap perlu/penting bagi pemakainya. Sedangkan *voluntary disclosure* dilakukan atas dasar kesukarelaan perusahaan dalam mengungkapkan suatu informasi (Suhardjanto dan Miranti, 2009).

*Mandatory disclosure* sangat penting untuk dilakukan, karena semakin luas pengungkapan informasi yang disajikan dalam *annual report* maka kualitas perusahaan akan semakin baik. *Mandatory disclosure* juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk memberikan jaminan bahwa modal yang ditanamkan investor pada perusahaan telah dikelola dengan efektif (Istiningrum, 2016).

Apabila perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang menyesatkan, hal ini dapat merusak kepercayaan investor sehingga dapat

berdampak pada harga saham perusahaan. Kasus terkait masalah pengungkapan pernah terjadi pada PT. Petromine Energy Trading di tahun 2011. Perusahaan tersebut tidak melaporkan pendapatan atas jasa penyediaan BBM kepada AKR Corporindo senilai Rp. 1,370 triliun dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp. 8,000 triliun. PT Petromine Energy Trading merupakan anak perusahaan Bakrie & Brothers. Akibat kasus tersebut, induk perusahaan mendapat sanksi dari BAPEPAM-LK senilai Rp. 4,000 milyar. Informasi yang tidak diungkapkan tersebut tentu akan merugikan pihak investor dan stakeholder lainnya. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya pengungkapan wajib laporan keuangan.

Standar akuntansi internasional, yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS) menghimbau kepada perusahaan untuk melakukan pengungkapan wajib secara penuh. Pasalnya, Indonesia telah mengadopsi IFRS setelah 1 Januari 2012 pada perusahaan *go public* maupun *multinational* (Nastiti dan Ratmono, 2015). Pengadopsian IFRS ini bertujuan untuk menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai suatu negara agar dapat memperkecil perbedaan di antara keduanya (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). IFRS juga telah diadopsi oleh negara-negara lain, sehingga hal ini memudahkan penggunaan informasi laporan keuangan bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan di Indonesia.

Pada kenyataannya, pasca pengadopsian IFRS di Indonesia, tingkat keputahan dalam pengungkapan wajib belum mencapai 100%. Sama seperti penelitian yang dilakukan Prawinandi dkk. (2012), menyebutkan bahwa pengadopsian IFRS bukan berarti akan menjamin bahwa pengungkapan informasi

yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi, melainkan diperlukan CG (*corporate governance*) yang berperan untuk mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan telah melakukan pengungkapan informasi yang dibutuhkan pengguna informasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Fauziah (2015), bahwa pengungkapan juga dipengaruhi oleh CG. CG yang baik perlu untuk dilakukan mengingat sering terjadi konflik antara manajemen dengan dewan komisaris ataupun dengan pemegang saham dalam pengambilan keputusan (Fatin,2017).

*Corporate governance* merupakan struktur yang terdiri dari *stakeholders*, pemegang saham, komisaris, dan manajer yang menyusun tujuan perusahaan, bersama-sama mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (Linda dan Kurnia, 2017). Dengan adanya struktur dalam CG diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam CG. Transparansi dapat diwujudkan dalam pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Artinya, perusahaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang baik-baik saja, namun perusahaan juga harus menyampaikan informasi sesuai apa yang terjadi tanpa ada yang dimanipulasi atau disembunyikan.

Pengungkapan informasi tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada investor dan *stakeholders*, namun juga kepada Allah SWT. Sehingga pengungkapan informasi harus dilakukan secara transparan, tanpa adanya unsur penipuan maupun menyembunyikan informasi kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang pada Q.S Al-Baqarah:282 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ  
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Mekanisme CG tidak terbatas pada proporsi atau komposisi dari dewan komisaris dan dewan direksi, namun struktur kepemilikan dan proses kerja dari jajaran dewan juga merupakan bagian dari mekanisme CG. Dalam penelitian ini, CG diproksikan dalam kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dan jumlah rapat dewan komisaris.

Struktur kepemilikan erat kaitannya dengan mekanisme CG, yang mana pada penelitian ini diproksikan dalam kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Sebagai pengelola sekaligus pemegang saham perusahaan, manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan yang telah dijalankan dengan melakukan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (Linda dan Kurnia, 2017). Penelitian yang dilakukan Utami, dkk (2012), Fauziah (2015) dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alvionita dan Taqwa (2015).

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan oleh yayasan, bank, perseroan terbatas (PT) dan institusi lainnya. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melakukan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Utami, dkk (2012), Alvionita dan Taqwa (2015),

Fauziah (2015), dan Widjayanti dan Wahidawati (2015). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliana (2016).

Struktur kepemilikan selanjutnya yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu maupun institusi yang berada di luar negeri. Dengan adanya keterbatasan bahasa dan geografis, investor asing pun hanya mengandalkan informasi yang tertuang dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan menekan pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi secara luas. Penelitian tentang pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dilakukan oleh Alvionita dan Taqwa (2015) dan menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan. Rustiarini (2011) meneliti tentang pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), menunjukkan hasil berpengaruh signifikan.

Menurut Prawinandi (2012), dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan masukan bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Jumlah dewan komisaris dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan. Salah satu peran dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terkait kebijakan perusahaan, termasuk tentang pengungkapan. Oleh karena itu, semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengungkapan informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meiflowerina, dkk. (2014) dan Gunawan dan Hendrawati (2016), mengidentifikasi bahwa CG yang diprosikan dalam jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

pasca konvergensi IFRS. Sedangkan berdasarkan penelitian Pitasari dan Septiani (2014), mengidentifikasi bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Independensi dewan komisaris sangat diperlukan, oleh karena itu suatu perusahaan yang terdaftar di BEI minimal memiliki 30% komisaris independen dari jumlah anggota dewan komisaris. Komisaris independen ini merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dengan adanya independensi dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fauziah (2015) dan Widjayanti dan Wahidawati (2015) bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara proporsi komisaris independen berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hendrawati (2016), dimana proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Kualitas kinerja dari dewan komisaris tidak hanya dilihat dari jumlah atau proporsinya saja. Namun, jumlah rapat yang dilakukan juga akan mempengaruhi kualitas kerjanya dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen. Hal ini diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan *mandatory disclosure* yang dilakukan perusahaan. Sutiyok dan Rahmawati (2014) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian

yang dilakukan Kharis dan Suhardjanto (2012) juga menunjukkan pengaruh signifikan jumlah rapat dewan komisaris terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pitasari dan Septiani (2014) dan Fatin (2017) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Dalam menjalankan tanggungjawabnya, dewan komisaris dibantu dengan komite audit, yang mana komite audit berperan untuk mengawasi pihak manajemen agar tidak melakukan kecurangan atau manipulasi untuk kepentingan pribadinya (Gunawan dan Hendrawati,2016). Semakin banyaknya jumlah anggota komite audit diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam melakukan *mandatory disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hendrawati (2016) dan Pitasari dan Septiani (2014), mengidentifikasi bahwa terdapat pengaruh signifikan positif jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sutyok dan Rahmawati (2014), menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah komite audit dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian yang dilakukan Ahmad, dkk. (2017) mengatakan bahwa pengungkapan informasi perusahaan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Investor memerlukan informasi yang relevan dan akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga investor dapat memaksimalkan keuntungannya. Sehingga secara tidak langsung

tingkat pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) akan mempengaruhi pergerakan harga saham.

Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Variabel independen pada penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dalam kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit. Serta pada penelitian ini juga meneliti pengaruh tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS terhadap *return* saham.

Sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2017. Alasan pemilihan sampel menggunakan perusahaan BUMN karena perusahaan BUMN merupakan perusahaan berplat merah yang mendapatkan suntikan modal dalam bentuk penyertaan saham oleh pemerintah Republik Indonesia, namun dalam beberapa dekade terdapat informasi-informasi bahwa pada perusahaan BUMN banyak terjadi indikasi korupsi dengan oknum pemerintah. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat, perusahaan BUMN perlu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik melalui pengungkapan informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “**PERAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT**

## **KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* KONVERGENSI IFRS DAN DAMPAKNYA TERHADAP *RETURN SAHAM*”.**

### **B. Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini, mekanisme CG diproksikan dalam kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit. Kemudian, tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada penelitian ini hanya berfokus pada laporan laba rugi komprehensif. Karena laporan laba rugi komprehensif merupakan bagian dari *annual report* perusahaan yang mendapat perhatian lebih dari investor maupun calon investor.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?

4. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
5. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
6. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
7. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
8. Apakah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap *return* saham?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji prediksi agensi teori yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara agen selaku pengelola perusahaan dengan prinsipal selaku pihak yang memberikan kontribusi dana kepada perusahaan. Dalam hubungan tersebut terdapat asimetri informasi, yang mana pihak manajemen mempunyai banyak informasi dibanding pemilik. Informasi tersebut kaitannya tentang kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. *Corporate governance* berperan sebagai pemeriksa dan pengawas terhadap pihak manajemen (*agent*) agar

transparan kepada investor (*pricipal*) yang dapat diwujudkan dengan melakukan pengungkapan informasi secara transparan.

2. Untuk menguji prediksi teori *stakeholders* bahwa perusahaan bukanlah entitas yang berdiri sendiri, namun perusahaan juga membutuhkan bantuan dari pihak lain (*stakeholders*) agar kegiatan operasionalnya dapat berlanjut. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan timbal balik kepada *stakeholders*, yang diwujudkan dengan pengungkapan informasi secara luas dan transparan.
3. Untuk menguji prediksi teori persinyalan bahwa manajemen perusahaan dapat memberikan sinyal kepada *signaler* sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemilik dan pihak manajemen. Pemberian sinyal dapat dilakukan dengan pengungkapan informasi kepada pihak pemakai informasi yang diharapkan dapat membantu pemakai dalam pengambilan keputusan.
4. Untuk menguji apakah pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas penanaman modal yang dilakukan investor.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di Bidang Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dari bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, jumlah anggota dewan komisaris,

proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, serta dampaknya terhadap *return* saham.

## 2. Manfaat Praktis

### - Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak manajemen perusahaan mengenai pentingnya melakukan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dalam rangka mendapatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan serta membantu *stakeholders* lainnya dalam pengambilan keputusan.

### - Bagi Investor

Dapat memberikan informasi tambahan kaitannya dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* suatu perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi sehingga *return* yang investor dapatkan maksimal.